



## Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Teluk Bintuni

Elisabeth Seno Matasik<sup>1</sup>, Kristian H.P. Lambe<sup>2</sup>, Since Erna Lamba<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Prodi Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

Submitted: 15-02-2026 | Review 22-02-2026 | Revision 02-03-2026 | Accepted 22-03-2026

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan anggaran serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya pada Sekretariat DPRD Kabupaten Teluk Bintuni. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan kunci yang terlibat langsung dalam pengelolaan anggaran. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran secara umum telah berjalan cukup efektif, ditandai dengan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan sesuai regulasi serta didukung oleh implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Namun, efektivitas tersebut masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan kompetensi dan jumlah sumber daya manusia, kendala teknis sistem informasi, keterlambatan administrasi dokumen, serta dinamika perubahan jadwal kegiatan DPRD. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi pemanfaatan sistem informasi, penguatan koordinasi antarbagian, serta perbaikan proses perencanaan anggaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat DPRD.

**Kata kunci:** efektivitas, pengelolaan anggaran, keuangan daerah, DPRD, SIPD.

### Abstract

*This study aims to analyze the effectiveness of budget management and identify the factors influencing it at the Secretariat of the Regional House of Representatives (DPRD) of Teluk Bintuni Regency. This research employs a qualitative approach with a descriptive method, utilizing in-depth interviews, observation, and documentation involving five key informants directly engaged in budget management. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana, including data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that budget management has generally been implemented effectively, as reflected in the alignment between planning, implementation, administration, and reporting in accordance with regulatory standards, and supported by the Regional Government Information System (SIPD). However, several constraints still hinder its effectiveness, including limited competency and number of human resources, technical issues in the information system, delays in administrative documentation, and dynamic changes in DPRD activity schedules. This study recommends enhancing human resource capacity, optimizing the use of information systems, strengthening inter-departmental coordination, and improving budget planning processes to achieve more effective and efficient budget management within the DPRD Secretariat.*

<sup>1</sup>E-mail: [elisabethsenomatasik@gmail.com](mailto:elisabethsenomatasik@gmail.com)

<sup>2</sup>E-mail: [kristian\\_lambe@ukipaulus.ac.id](mailto:kristian_lambe@ukipaulus.ac.id)

<sup>3</sup>E-mail: [since\\_lamba@gmail.com](mailto:since_lamba@gmail.com)

**Keywords:** *effectiveness, budget management, regional finance, DPRD, SIPD.*

## Pendahuluan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), terutama dalam konteks peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran publik. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia terus mendorong reformasi pengelolaan keuangan daerah melalui digitalisasi, salah satunya melalui implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan daerah secara lebih sistematis dan terukur (Maulani et al., 2024).

Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi sistem tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Meskipun SIPD mampu meningkatkan efisiensi administrasi dan akurasi data, efektivitasnya masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, ketidakstabilan sistem, serta rendahnya kesiapan infrastruktur teknologi di beberapa daerah (Amalina, 2025; Septiani & Isnawaty, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem, tetapi juga oleh kapasitas organisasi dan kualitas tata kelola yang mendukungnya.

Fenomena tersebut juga tercermin dalam praktik pengelolaan anggaran di berbagai perangkat daerah, termasuk pada lembaga legislatif seperti Sekretariat DPRD. Berbeda dengan organisasi perangkat daerah lainnya, Sekretariat DPRD memiliki peran strategis dalam mendukung fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan anggaran pada lembaga ini menjadi krusial dalam menentukan kualitas kinerja kelembagaan DPRD secara keseluruhan.

**Tabel 1.** Fenomena Pengelolaan Anggaran dan Implementasi SIPD di Indonesia

No	Fenomena	Temuan Penelitian	Implikasi
1	Implementasi SIPD belum optimal	Sistem sering mengalami error dan membutuhkan adaptasi pengguna	Menghambat efektivitas pengelolaan keuangan daerah
2	Keterbatasan SDM	Kompetensi pengguna sistem masih rendah	Menurunkan kualitas pengelolaan anggaran
3	Kendala teknis sistem	Server tidak stabil dan integrasi sistem belum maksimal	Menghambat proses administrasi dan pelaporan
4	Koordinasi antarbagian belum optimal	Komunikasi internal belum sepenuhnya efektif	Memicu keterlambatan realisasi anggaran

Sumber: disarikan dari berbagai studi empiris (2023–2025)

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji efektivitas pengelolaan keuangan daerah, sebagian besar masih berfokus pada pemerintah daerah secara umum atau pada organisasi perangkat daerah tertentu seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Penelitian yang secara spesifik mengkaji efektivitas pengelolaan anggaran pada Sekretariat DPRD, khususnya di daerah dengan karakteristik geografis dan infrastruktur terbatas seperti Kabupaten Teluk Bintuni, masih relatif terbatas. Padahal, kondisi daerah tersebut menghadirkan tantangan unik, seperti keterbatasan akses, kapasitas SDM, serta dinamika pelaksanaan kegiatan legislatif yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran.

Lebih lanjut, efektivitas pengelolaan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, ketepatan waktu pelaksanaan, kualitas output kegiatan, serta tingkat kepuasan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk memahami secara mendalam bagaimana proses pengelolaan anggaran berlangsung serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya dalam konteks kelembagaan legislatif daerah.

### **Urgensi Penelitian**

Penelitian ini menjadi penting karena memberikan kontribusi empiris dalam mengisi kesenjangan literatur terkait efektivitas pengelolaan anggaran pada Sekretariat DPRD, khususnya di daerah dengan keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, memperkuat implementasi digitalisasi melalui SIPD, serta mendukung peningkatan kinerja fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD secara lebih efektif dan akuntabel.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Teluk Bintuni?
2. Apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Teluk Bintuni?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dalam mendukung fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD?

### **Tinjauan Literatur**

#### **Konsep Pengelolaan Anggaran Daerah**

Pengelolaan anggaran daerah merupakan proses sistematis yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam perspektif manajemen publik, pengelolaan anggaran tidak hanya berorientasi pada alokasi sumber daya, tetapi juga pada pencapaian kinerja dan hasil yang terukur (Mardiasmo, 2018). Sejalan dengan itu, penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) menekankan keterkaitan antara input, output, dan outcome dalam setiap program pemerintah (Halim & Kusufi, 2021).

Regulasi terbaru di Indonesia juga memperkuat pentingnya pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan transparansi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pendekatan ini menuntut pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

### **Prinsip-Prinsip Pengelolaan Anggaran**

Pengelolaan anggaran daerah harus berlandaskan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2019). Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada publik, sedangkan akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran secara tepat dan terukur.

Selain itu, prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi indikator utama dalam menilai kualitas pengelolaan anggaran. Efisiensi berfokus pada penggunaan sumber daya secara optimal, sementara efektivitas mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran program dapat tercapai (Mahsun, 2022). Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik dan berintegritas.

### **Efektivitas Pengelolaan Anggaran**

Efektivitas pengelolaan anggaran merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui penggunaan anggaran yang tersedia. Dalam konteks sektor publik, efektivitas tidak hanya dilihat dari tingkat serapan anggaran, tetapi juga dari kualitas output dan outcome yang dihasilkan (Mahmudi, 2019).

Pendekatan value for money menempatkan efektivitas sebagai salah satu dimensi utama bersama dengan ekonomi dan efisiensi (Mardiasmo, 2020). Efektivitas menunjukkan sejauh mana kegiatan yang dibiayai oleh anggaran mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas pengelolaan anggaran perlu mempertimbangkan beberapa indikator, antara lain kesesuaian antara rencana dan realisasi, ketepatan waktu penyerapan anggaran, kualitas hasil kegiatan, serta kepuasan pemangku kepentingan (Mahsun, 2022).

Dalam kerangka New Public Management (NPM), efektivitas pengelolaan anggaran juga dikaitkan dengan peningkatan kinerja organisasi publik melalui penerapan sistem pengukuran kinerja yang berbasis hasil (output dan outcome) (Hood, 1995; diperbarui dalam konteks modern oleh Pollitt & Bouckaert, 2017).

### **Teori Good Governance dan Akuntabilitas Publik**

Good governance merupakan konsep yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Sedarmayanti, 2018). Dalam konteks pengelolaan anggaran daerah, penerapan prinsip good governance menjadi kunci dalam meningkatkan kepercayaan publik serta meminimalkan potensi penyimpangan.

Akuntabilitas publik merupakan salah satu pilar utama dalam good governance, yang mengharuskan setiap instansi pemerintah mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik secara terbuka dan dapat diaudit (Mahsun, 2022). Akuntabilitas mencakup aspek keuangan, kinerja, prosedural, dan kebijakan, yang semuanya harus terintegrasi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan anggaran. Daerah yang menerapkan transparansi dan akuntabilitas secara konsisten cenderung memiliki tingkat serapan anggaran yang lebih baik serta kualitas program yang lebih tinggi (Kusuma & Puspitasari, 2023).

## **Peran Sistem Informasi dalam Pengelolaan Anggaran**

Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui sistem informasi seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi salah satu inovasi penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran. SIPD memungkinkan integrasi data perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan dalam satu platform yang terpusat (Amalina, 2025).

Namun demikian, implementasi sistem informasi ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya kompetensi pengguna, serta kendala teknis sistem (Septiani & Isnawaty, 2024). Oleh karena itu, keberhasilan penerapan sistem informasi sangat bergantung pada kesiapan organisasi, kualitas sumber daya manusia, serta dukungan kebijakan yang memadai.

## **Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran pada Sekretariat DPRD umumnya berada pada kategori cukup efektif, namun masih menghadapi berbagai kendala. Rustanti dan Sudharma (2022) menemukan bahwa pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Provinsi Bali telah berjalan efektif dengan tingkat realisasi yang tinggi, meskipun masih terdapat hambatan dalam koordinasi dan administrasi.

Haryanti dan Apriliani (2023) menekankan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan transparansi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran. Sementara itu, Ismail dan Saggaf (2020) mengungkapkan bahwa keterbatasan sistem informasi dan monitoring menjadi kendala dalam pelaporan dan evaluasi anggaran.

Penelitian terbaru oleh Halim dan Karlina (2025) menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran sangat dipengaruhi oleh faktor waktu pelaksanaan program serta dinamika kebijakan yang berubah di tengah tahun anggaran. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang kompleks, sehingga memerlukan pendekatan yang komprehensif dalam analisisnya.

## **Kerangka Konseptual**

Berdasarkan kajian literatur, efektivitas pengelolaan anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu proses pengelolaan anggaran (perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan), penerapan prinsip good governance (transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan), serta dukungan sistem informasi dan kualitas sumber daya manusia.

Ketiga aspek tersebut berkontribusi terhadap tingkat efektivitas pengelolaan anggaran yang diukur melalui indikator kesesuaian antara rencana dan realisasi, ketepatan waktu penyerapan, kualitas hasil kegiatan, serta kepuasan pemangku kepentingan. Dengan demikian, penelitian ini mengintegrasikan perspektif manajemen keuangan publik, good governance, dan digitalisasi dalam menganalisis efektivitas pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD.

## **METODE**

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena efektivitas pengelolaan anggaran dalam konteks nyata di

lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Teluk Bintuni. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual terkait proses pengelolaan anggaran, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta upaya peningkatan efektivitasnya.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, persepsi, dan pengalaman informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan anggaran, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif dan kontekstual.

### **Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel**

Dalam penelitian kualitatif, konsep populasi tidak digunakan secara statistik seperti pada penelitian kuantitatif, melainkan lebih menekankan pada pemilihan informan yang relevan dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teknik **purposive sampling**, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan anggaran.

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak lima orang yang memiliki peran strategis, yaitu:

1. Sekretaris DPRD Kabupaten Teluk Bintuni
2. Kepala Sub Bagian Anggaran
3. Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan
4. Ketua DPRD Kabupaten Teluk Bintuni
5. Ketua Badan Anggaran DPRD

Pemilihan informan tersebut didasarkan pada keterlibatan langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, verifikasi, serta pengawasan anggaran, sehingga data yang diperoleh bersifat mendalam dan relevan dengan tujuan penelitian.

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Lokasi ini dipilih karena memiliki peran strategis dalam mendukung fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD, serta menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan anggaran daerah.

Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama dua bulan, yaitu pada bulan November hingga Desember 2025. Rentang waktu ini digunakan untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi secara intensif.

### **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

1. **Data primer**, yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan.
2. **Data sekunder**, yang diperoleh dari dokumen resmi seperti Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), serta laporan keuangan daerah dan regulasi terkait.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- **Wawancara mendalam**, dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi terkait proses pengelolaan anggaran, kendala yang dihadapi, dan upaya perbaikan.

- **Observasi**, dilakukan secara langsung untuk mengamati aktivitas pengelolaan anggaran dan dinamika kerja di lingkungan Sekretariat DPRD.
- **Dokumentasi**, dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran untuk mendukung validitas data.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana, yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu:

1. **Reduksi data (data reduction)**  
Proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengelompokan data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi untuk menghasilkan informasi yang terfokus.
2. **Penyajian data (data display)**  
Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel untuk memudahkan pemahaman serta mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel.
3. **Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification)**  
Tahap ini dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis serta melakukan verifikasi melalui triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan validitas dan reliabilitas data.

Melalui tahapan tersebut, penelitian ini mampu menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan anggaran, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi serta rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Objek Penelitian**

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Teluk Bintuni merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD. Secara struktural, Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat DPRD menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, serta dukungan teknis terhadap kegiatan DPRD. Struktur organisasi terdiri atas beberapa bagian, termasuk bagian keuangan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

Berdasarkan hasil observasi, aktivitas pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD telah didukung oleh penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun demikian, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kendala teknis sistem, serta dinamika kegiatan DPRD yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan anggaran.

### **Karakteristik Informan**

Sebagai penelitian kualitatif, penelitian ini melibatkan informan yang dipilih secara purposive berdasarkan peran strategis dalam pengelolaan anggaran.

**Tabel 2.** Karakteristik Informan Penelitian

No	Jabatan	Peran dalam Pengelolaan Anggaran	Masa Kerja
1	Sekretaris DPRD	Koordinator utama kebijakan dan pengelolaan anggaran	± 2 tahun
2	Kepala Sub Bagian Anggaran	Perencanaan dan penyusunan anggaran	± 3 tahun
3	Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan	Verifikasi dan penatausahaan keuangan	± 4 tahun
4	Ketua DPRD	Pengawasan dan arah kebijakan anggaran	± 2 tahun
5	Ketua Badan Anggaran DPRD	Pembahasan dan evaluasi anggaran	± 2 tahun

Sumber: Data primer (2026)

Karakteristik informan menunjukkan bahwa seluruh responden memiliki pengalaman dan keterlibatan langsung dalam proses pengelolaan anggaran, sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.

### Temuan Penelitian

#### Efektivitas Pengelolaan Anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Teluk Bintuni secara umum telah berjalan cukup efektif. Hal ini terlihat dari kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta dukungan terhadap fungsi DPRD.

Salah satu informan menyatakan:

*"Secara umum pengelolaan anggaran sudah mendukung pelaksanaan fungsi DPRD, meskipun masih terdapat keterlambatan dalam beberapa kegiatan."*

Namun demikian, efektivitas tersebut belum optimal karena masih terdapat kendala dalam proses pelaksanaan, terutama terkait ketepatan waktu penyerapan anggaran.

#### Faktor Internal yang Mempengaruhi

Faktor internal utama yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan kompetensi teknis.

Informan menyatakan:

*"Kompetensi SDM cukup memadai, tetapi masih perlu peningkatan melalui pelatihan, terutama dalam penggunaan sistem informasi."*

Selain itu, jumlah SDM yang terbatas menyebabkan beban kerja yang tinggi, sehingga berdampak pada keterlambatan administrasi dan pelaporan.

#### Faktor Eksternal yang Mempengaruhi

Faktor eksternal yang dominan meliputi kebijakan pemerintah daerah, kendala teknis sistem SIPD, serta dinamika kegiatan DPRD.

Salah satu informan mengungkapkan:

*"Penggunaan SIPD membantu, tetapi terkadang terdapat kendala teknis seperti jaringan"*

*yang tidak stabil.”*

Selain itu, perubahan jadwal kegiatan DPRD juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan anggaran.

### Analisis Tematik

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data, dilakukan pengelompokan tema untuk mengidentifikasi pola utama dalam penelitian.

**Tabel 3.** Analisis Tematik

Tema Utama	Subtema	Indikator	Temuan
Efektivitas Pengelolaan Anggaran	Kesesuaian perencanaan dan realisasi	Realisasi anggaran	Cukup efektif
	Ketepatan waktu	Penyerapan anggaran	Masih terdapat keterlambatan
Faktor Internal	Kompetensi SDM	Pelatihan dan kemampuan teknis	Perlu peningkatan
	Jumlah SDM	Beban kerja	Terbatas
	Sistem informasi (SIPD)	Stabilitas sistem	Terdapat kendala teknis
Faktor Eksternal	Kebijakan pemerintah	Perubahan regulasi	Mempengaruhi pelaksanaan
	Dinamika kegiatan DPRD	Perubahan jadwal	Menghambat realisasi
	Pengembangan SDM	Pelatihan dan bimtek	Diperlukan
Upaya Perbaikan	Koordinasi	Komunikasi antarbagian	Perlu ditingkatkan
	Optimalisasi sistem	Pemanfaatan SIPD	Perlu perbaikan teknis

Sumber: Data primer (2026)

### Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Teluk Bintuni berada pada kategori **cukup efektif**, yang sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya (Rustanti & Sudharma, 2022; Haryanti & Apriliani, 2023).

Namun, jika ditinjau lebih kritis, klaim “cukup efektif” ini sebenarnya masih problematik. Efektivitas yang dimaksud lebih banyak bertumpu pada kepatuhan prosedural (compliance-based), bukan pada pencapaian outcome atau dampak nyata. Artinya, meskipun proses pengelolaan anggaran telah sesuai regulasi, belum tentu menghasilkan kinerja yang optimal.

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi faktor kunci yang menghambat efektivitas, sejalan dengan temuan Amalina (2025) yang menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi keuangan daerah sangat bergantung pada kompetensi pengguna sistem. Selain itu, kendala teknis SIPD menunjukkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya menjadi solusi, melainkan juga menciptakan tantangan baru.

Dari perspektif teori **good governance**, temuan ini mengindikasikan bahwa prinsip efektivitas dan efisiensi belum sepenuhnya tercapai, meskipun transparansi dan akuntabilitas mulai terbangun melalui penggunaan sistem informasi.

Lebih jauh, dinamika kegiatan DPRD yang sering berubah menunjukkan adanya

kelemahan dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan penganggaran masih bersifat administratif, belum sepenuhnya adaptif dan strategis.

### **Implikasi Hasil Penelitian**

Secara **praktis**, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran tidak cukup hanya dengan memperbaiki sistem, tetapi juga harus disertai dengan peningkatan kapasitas SDM dan perbaikan koordinasi organisasi.

Secara **teoritis**, penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa efektivitas pengelolaan anggaran merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor internal, eksternal, dan teknologi, sehingga memerlukan pendekatan integratif dalam pengelolaannya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Teluk Bintuni secara umum telah berjalan **cukup efektif**, ditinjau dari kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan anggaran yang telah mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah serta didukung oleh implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Namun demikian, efektivitas tersebut belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah, yang berdampak pada tingginya beban kerja serta keterlambatan administrasi. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kendala teknis dalam penggunaan sistem informasi, perubahan kebijakan pemerintah daerah, serta dinamika jadwal kegiatan DPRD yang mempengaruhi ketepatan waktu penyerapan anggaran.

Dengan demikian, efektivitas pengelolaan anggaran masih cenderung bersifat administratif dan prosedural, serta belum sepenuhnya berorientasi pada pencapaian outcome dan kinerja yang optimal.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**  
Diperlukan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan bagi aparatur pengelola keuangan daerah, khususnya dalam penguasaan regulasi terbaru dan penggunaan sistem informasi keuangan (SIPD).
2. **Optimalisasi Sistem Informasi Keuangan Daerah**  
Pemerintah daerah perlu meningkatkan stabilitas dan kualitas infrastruktur sistem informasi, termasuk dukungan jaringan dan pemeliharaan sistem, agar dapat menunjang proses pengelolaan anggaran secara lebih efektif.
3. **Penguatan Koordinasi Antarbagian**  
Diperlukan peningkatan koordinasi dan komunikasi internal antarbagian di lingkungan Sekretariat DPRD guna meminimalkan keterlambatan administrasi serta meningkatkan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan.
4. **Perbaikan Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja**  
Proses perencanaan anggaran perlu disusun secara lebih realistis, adaptif, dan

berbasis kinerja, dengan mempertimbangkan dinamika kegiatan DPRD sehingga dapat meminimalkan deviasi antara rencana dan realisasi.

5. **Penguatan Monitoring dan Evaluasi**

Diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga menghasilkan manfaat yang optimal bagi kinerja kelembagaan DPRD.

## Daftar Pustaka

- Amalina, R. (2025). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Keuangan Publik Indonesia*, 12(1), 45–58.
- Halim, A., & Karlina, D. (2025). Budget execution challenges and performance outcomes in regional government institutions. *Journal of Public Budgeting and Finance*, 8(2), 101–115.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2021). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah* (Edisi revisi). Salemba Empat.
- Haryanti, D., & Apriliani, R. (2023). The role of human resource competence and transparency in improving budget management effectiveness. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 89–102.
- Hood, C. (1995). The “New Public Management” in the 1980s: Variations on a theme. *Accounting, Organizations and Society*, 20(2–3), 93–109.
- Ismail, T., & Saggaf, S. (2020). Information systems and financial reporting quality in public sector organizations. *International Journal of Public Sector Management*, 33(4), 457–472.
- Kusuma, A. R., & Puspitasari, L. (2023). Good governance and its impact on regional financial performance. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 5(1), 33–47.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen keuangan daerah* (Edisi terbaru). UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2022). *Pengukuran kinerja sektor publik* (Edisi terbaru). BPFE.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Andi Offset.
- Mardiasmo. (2020). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi Offset.
- Maulani, S., Rahman, A., & Putri, D. (2024). Digital transformation in regional financial management through SIPD implementation. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 9(1), 12–25.
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). *Public management reform: A comparative analysis into the age of austerity* (4th ed.). Oxford University Press.
- Roreng, P. P., & Halik, J. B. (2025). *New Public Management: Paradigma Baru dalam Manajemen Sektor Publik* (W. Yuliani (ed.); 1st ed.). CV. Luminary Press Indonesia.
- Rustanti, E., & Sudharma, I. N. (2022). Effectiveness of budget management in regional legislative institutions. *Jurnal Akuntansi Publik*, 6(2), 77–88.
- Sedarmayanti. (2018). *Good governance: Kepemerintahan yang baik*. Mandar Maju.
- Septiani, R., & Isnawaty, N. (2024). Challenges in implementing regional government information systems (SIPD). *Jurnal Manajemen Publik*, 11(1), 55–68.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.